



Dorong Pemerintah Daerah

PONTIANAK – Sumber daya manusia menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa di Kalbar. Anggaran dana desayang digelontorkan pusat untuk daerah memiliki jumlah yang cukup tinggi. Oleh karena itu Badan Pengawas Keuangan (BPK) mendorong pemerintah daerah agar melakukan pembinaan kepada desa khususnya dalam penyusunan laporan keuangan.

Anggota VI BPK RI, Bahrolah Akbar mengatakan bahwa

BPK mempunyai kebijakan untuk mengingatkan kepada pemerintah. "Makanya kami mengundang pemangku kebijakan disini para bupati dan waki supaya ada perencanaan yang sinergi antara desa dan kabupaten dan provinsi, serta pusat," ungkapnya saat ditemui pada Forum Grup Diskusi (FGD) di Hotel Mercure, Senin (3/4).

Dalam pengelolaan dana desa, katanya, sumber daya desamenjadikendal khususny dalam hal pelaporan

keuangan desa. "Oleh karena itu BPK ingin mengingatkan pemerintahan daerah supaya ada pembinaan kepada desa-desa khususnya dalam penyusunan laporan keuangan," ungkapnya. Meski desa tidak menjadi objek dalam pemeriksaan BPK, namun menurut Bahrollah pengawasan dalam pengelolaan dana desa tetap dilakukan melalui inspektorat kabupaten sebagai medianya, oleh sebabnya itu pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah

dalam FGD ini untuk mendorong persolan pengelolaan dana desa di Kalbar.

Anggota Komisi XI DPR RI, Sukiman mengatakan bahwa dalam FGD kali ini dirinya hadir untuk mendengar apa yang menjadi persolan tentang pengelolaan dana desa. Sukiman mengaku secara umum ia sudah mengetahui persolan yang menyangkut pelaporan dana desa supaya akuntabilitas dan transparansi antara penggunaan dan pemanfaatan dana desa ini

dapat mendorong percepatan pembangunan, pemerataan, dan terjadinya desa mandiri. "Kita sudah tahu bahwa yang menjadi persoalannya menyangkut kesiapan pelaporan dari dana desa ini yang menjadi kendala dalam menyangkut SDM nya," ungkapnya.

Menurutnya apalagi kalau yang menjadi objek pemeriksaan BPK itu adalah desa. Namun beruntung BPK tidak menempatkan desa sebagai objek pemeriksaan, karena menurutnya desa masih be-

lum siap terkait SDM yang ada.

"Jangankan desa, kabupaten/kota saja masih ada yang disiplin. Artinya harus ada komitmen bersama tentu kita berharap pemanfaatan dan desain perlu adanyasinerjisitas antara pusat, provinsi daerah dan desa ini sehingga apa yang menjadi semangat kita supaya menjadi desa yang mandiri yang mampu berdiri sendiri," paparnya.

Sukiman menambahkan bahwa menurutnya tidak

mudah untuk mencapai itu semua oleh karena itu dia terus mendorong kesiapan terutama menyangkut SDM. "Mudah-mudahan kedepan dengan adanya pembimbingan dan pendampingan oleh BPK ini akan mampu mengelola dana desa tepat sasaran," tegasnya. Dalam FGD ini, hampir seluruh wakil bupati dan jug beberapa bupati di daerah Kalbar menghadiri FGD yang membahas pemanfaatan pengelolaan dana desa tersebut. (gef)

terus mendorong kesiapan terutama menyangkut SDM. "Mudah-mudahan kedepan dengan adanya pembimbingan dan pendampingan oleh BPK ini akan mampu mengelola dana desa tepat sasaran," tegasnya. Dalam FGD ini, hampir seluruh wakil bupati dan jug beberapa bupati di daerah Kalbar menghadiri FGD yang membahas pemanfaatan pengelolaan dana desa tersebut. (gef)